

STRATEGI PENGELOLAAN PENDIDIKAN BERBASIS KEPULAUAN DI MALUKU

Onisimus Amtu
Dosen STAKPN Ambon

Abstrak: Konteks kepulauan di Maluku memerlukan pendekatan perencanaan pendidikan yang spesifik. Perencanaan dimaksud bersifat heterogen, karena memandang masing-masing pulau dengan karakteristik yang berbeda-beda. Aspek geografi, demografi dan sosial-kultur masing-masing daerah berbeda satu dengan yang lain. Daerah terpencil dan pulau-pulau terluar membutuhkan perlakuan khusus dalam perencanaan dan penerapan kebijakan pengelolaan pendidikan. Rentang kendali pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendidikan selama ini terkesan terabaikan. Dibutuhkan suatu strategi pengelolaan yang komprehensif dan sinergis untuk mempermudah masyarakat lokal mengakses pendidikan sebagaimana mestinya.

Kata kunci: Strategi, Pengelolaan, Pendidikan, Kepulauan

I. PENDAHULUAN

Maluku merupakan salah satu provinsi kepulauan di Indonesia yang memiliki sebanyak 972 buah pulau besar maupun kecil dengan luas wilayah : 712.479,69 km, luas daratan : 54.185 km dan luas lautan : 658.294,69 km. Dengan luas lautan yang tidak seimbang dengan daratan (1 : 9), dipastikan akan menjadi kendala tersendiri dalam proses pengelolaan pendidikannya. Memang harus diakui bahwa dengan luas lautan yang dimiliki, tentu menjadi karakteristik tersendiri. Laut mengandung kekayaan alam yang tak akan habis digarap karena menjadi sumber pendapatan dan penghidupan masyarakat. Namun disisi lain menjadi kendala dalam proses pengorganisasian pendidikan. Konteks otonomi daerah yang kini diterapkan, ternyata semakin memperlebar jurang

pemisah antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya. Bagi kabupaten yang tingkat pendapatannya asli daerah (PAD)-nya tinggi, maka mungkin saja akan terlihat perkembangan strategi pendidikannya, tetapi bagaimana dengan kemajuan pendidikan kabupaten lainnya yang hanya bergantung pada bantuan Pemerintah Pusat karena memiliki sumber daya alam yang minim?

Dengan karakteristik seperti itu, tentu dibutuhkan suatu perencanaan sistem pengelolaan pendidikan yang matang, terpadu, terencana dan berkesinambungan sehingga masyarakat dapat mengenyam pendidikan sebagaimana layaknya. Hak untuk mengenyam dan mengakses pendidikan adalah hak setiap warga negara. "Pendidikan nasional berfungsinya mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban